

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Para pakar ekonomi percaya bahwasanya pertumbuhan ekonomi ialah salah satu parameter untuk menakar kemajuan ekonomi suatu wilayah/ bangsa/ negara. Atas dasar ini, setiap negara berupaya memajukan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu keadaan yang bisa dilihat bagaimana suatu negara dapat berkembang secara normal karena adanya suatu eskalasi produksi dalam negeri yang didukung oleh sektor-sektor ekonomi yang turut serta memberikan kontribusi terhadap PDB.

Perekonomian akan tumbuh ketika implementasi barang dan jasa menemui eskalasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana kesibukan ekonomi bisa melahirkan pendapatan tambahan ataupun barang bersama saat mensejahterakan rakyat pada jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau Daerah yang terus membaik membuktikan bahwasanya perekonomian negara atau Daerah tersebut berjalan dengan semestinya (Novriansyah, 2018).

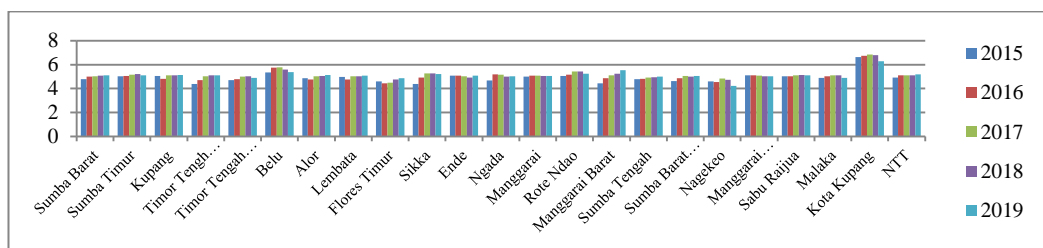
Faktor penyebab berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi sebuah Negara atau Daerah yaitu bisa dicermati dari kondisi sosial ekonominya apakah penduduk di wilayah tersebut sudah terbebas dari kemiskinan, penyerapan tenaga kerja yang optimal diimbangi dengan upah yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan, serta kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Kondisi itu sejalan dengan teori yang dikemukakan Robert Solow dengan penekanan bahwasanya pertumbuhan akan terjadi atas 2 faktor yaitu akumulasi modal dan tenaga kerja. Robert Solow mengemukakan pendapatnya bahwasanya sejumlah kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal dalam bentuk investasi jangka panjang dan pendek, serta pemakaian teknologi modern merupakan penunjang dalam pertumbuhan ekonomi (Idris A., 2016).

Indonesia yakni negara yang mengantepi sistem desentralisasi, dimana Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah salah satu Provinsi dari 34 Provinsi yang dimiliki Indonesia. Menurut database peraturan DPR RI (2004), undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 mengutarakan bahwasanya otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Masalah nasional yang dihadapi yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong kecil jika disandingkan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, dan Maluku. Menurut kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam artikel Lowekeda A. (2020) ini terjadi karena belum ada suatu industri unggulan yang membuat perekonomian didaerah tersebut bangkit dan kegiatan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih melanjutkan dari kegiatan di tahun sebelumnya, lewat fenomena ini peneliti memilih Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi penelitian. Menurut BPS (2021), tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendiami antrean ke-16 terendah dari 34 Provinsi di Indonesia, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terus mengalami perubahan dalam waktu 5 tahun terakhir (2015-2019).

**Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTT (persen)
Tahun 2015-2019**



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Berdasarkan dari grafik 1. Dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi disetiap tahunnya, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di NTT sebesar 5,12% lalu ditahun 2017 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,11%. Menurut Lowekeda A. (2020), hal ini disebabkan masih dominannya sektor pertanian dalam penyumbang pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatan SDA dan SDM di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum dikelola dengan

Pratiwi Sulistyowati, 2021

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

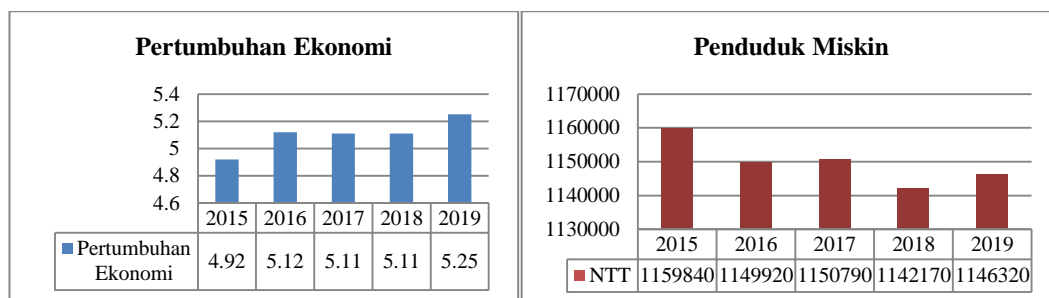
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

baik sehingga belum ada sesuatu yang baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan lahan kering serta keras berbatu sehingga sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini adalah pertanian berupa tanaman jagung, kacang tanah, kedelai, dan ubi jalar. Sehingga untuk mengoptimalkan daerah tersebut dibutuhkan teknologi agar produksi menjadi optimal dan bisa memaksimalkan potensi SDA di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknologi yang digunakan berupa traktor, pompa air, *excavator*, benih tanaman unggulan, dan obat pembasmi hama (Tani, 2020).

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan penduduk miskin yaitu ketika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menemui fluktuasi dan terkadang tidak bergerak maka kesejahteraan penduduk harus diperhatikan, karena jikalau penduduk yang tidak sejahtera banyak harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah agar tidak menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih kompleks (Novriansyah, 2018).

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi (Persen) dan Penduduk Miskin (Jiwa) Menurut Provinsi Tahun 2015-2019



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Berdasarkan grafik 2. Jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT di tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan fluktuasi disetiap tahunnya. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tidak bergerak tetap di angka 5.11% tetapi jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 1.142.170 jiwa atau sebesar 21,35%, kemudian ditahun 2019 pertumbuhan ekonomi meningkat di

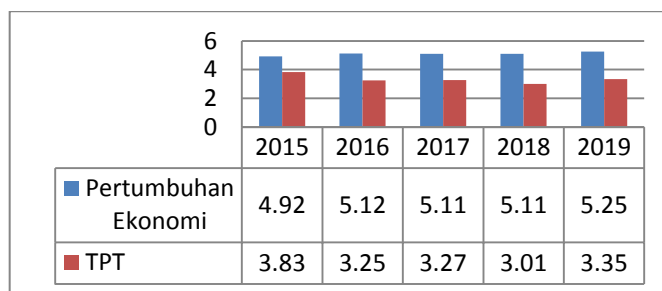
Pratiwi Sulistyowati, 2021

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

angka 5.25% namun penduduk miskin ikut meningkat menjadi 1.146.320 jiwa atau sebesar 21,09%. Jumlah penduduk miskin Provinsi NTT ini kurang berdampak pada pertumbuhan ekonomi disana, hal ini dipicu sebab masih tingginya persentase penduduk miskin melebihi persentase penduduk miskin secara nasional. Salah satu faktor pemicu tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT yaitu melimpahnya SDA yang cukup banyak dan beragam namun potensi disetiap sektornya belum dapat diolah secara maksimal dalam memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan penduduk daerah NTT terutama dibidang pertanian dalam mencegah kelaparan (Labola Y. A., 2017)

Permasalahan selanjutnya yang timbul akibat berfluktuasi pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya yaitu penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal. Mereka yang ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan maka tidak dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, kondisi ini menyiratkan bahwasanya penawaran jumlah tenaga kerja tak sepadan dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan sehingga menimbulkan masalah pengangguran (Mankiw, 2020).

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi (Persen) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTT ini berfluktuasi disetiap tahunnya, hal ini bisa dilihat dari grafik 3. Menunjukkan bahwa ditahun 2018 tingkat pengangguran terbuka menurun dari tahun sebelumnya, namun pertumbuhan ekonominya ditahun 2018 tetap berada 5,11% yang mana sama dengan tahun sebelumnya serta ditahun 2019 tingkat pengangguran terbuka naik

Pratiwi Sulistyowati, 2021

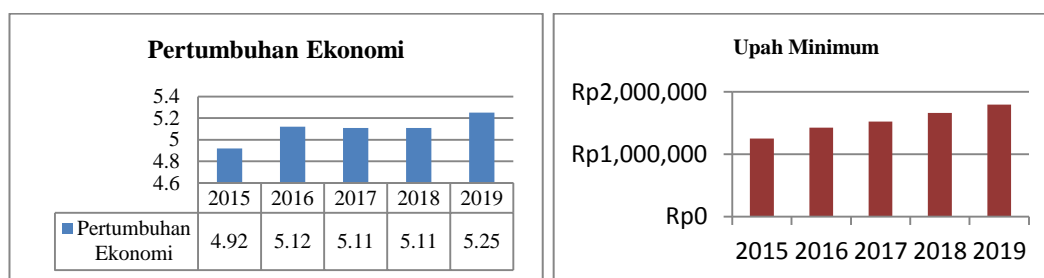
DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menjadi 3.35% dan pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat menjadi 5.25%. Permasalahan pengangguran timbul bermula dari tingginya taraf perubahan angkatan kerja di Provinsi NTT yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang lapang dan penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal.

Permasalahan berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi selanjutnya yaitu tingkat upah, dikarenakan adanya ketidak sesuaian upah yang ditawarkan oleh penawar kerja dibawah dari penetapan pemerintah. Upah merupakan hak para pekerja yang wajib dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja serta kesepakatan antar pencari kerja dan penawar kerja (Seran, 2016).

Sulitnya untuk menaikkan UMP di Provinsi Nusa Tenggara Timur dikarenakan produktivitas pekerja serta pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut masih rendah sehingga sukar untuk menaikkan upah minimum sesuai dengan ketentuan perhitungan penentuan upah, perhitungan ini di tentukan berdasarkan dari tingkat inflasi dan nilai PDRB. Kemudian, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini belum memiliki industri primadona yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi (Deny, 2016).

**Grafik 4. Pertumbuhan Ekonomi (Persen) dan Upah Minimum (Rupiah)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019**



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Pada grafik 4. Menunjukkan bahwa upah minimum ditahun 2015-2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.11% dan ditahun berikutnya pertumbuhan ekonomi tidak bergerak sama seperti ditahun sebelumnya. Permasalahan upah

Pratiwi Sulistyowati, 2021

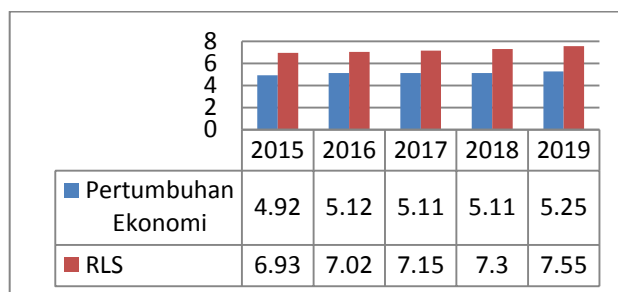
DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

minimum setiap tahun naik tetapi belum efektif dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yaitu masih banyak pekerja informal yang di upah tidak sinkron dengan UMP yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi NTT. Upah di Provinsi NTT dibawah 2 juta rupiah, hal ini membuat Provinsi NTT masuk kedalam kategori provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia pada tahun 2019 dengan posisi ke 4 selepas Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat (Zuhriyah D. A., 2019)

Menurut Sumarsono, penentuan upah didasarkan pada adanya kebutuhan fisik minimum (KFM) yang merefleksikan sebagai nilai ekonomi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pekerja serta keluarganya supaya bisa mempertahankan hidup selama 1 bulan, kemudian indeks harga konsumen (IHK) ini mencerminkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menunjang kehidupannya, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong peningkatan kuantitas barang dan jasa yang dibuat (Seran, 2016).

Faktor lain yang bisa mensugesti pertumbuhan ekonomi ialah tingkat pendidikan. Tingkatan pendidikan saat ini digunakan sebagai salah satu kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam mendeskripsikan taraf pendidikan penduduk secara holistik maka digunakan salah satu indikatornya yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun penduduk telah mengenyam pendidikan formal (Kennedy et al., 2019).

Grafik 5. Pertumbuhan Ekonomi (Persen) dan Rata-Rata Lama Sekolah (Persen) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Pratiwi Sulistyowati, 2021

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada grafik 5. Rata-rata lama sekolah merupakan suatu representasi yang digunakan pada penelitian ini. Tahun 2017 rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 7,15 % namun pertumbuhan ekonominya menurun menjadi 5,11%, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam mendukung program pemerintah 12 tahun belajar dalam menyeimbangkan pendidikan di setiap daerah yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi, sebab eskalasi kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang merupakan faktor krusial dalam pendidikan.

Menurut Kennedy et al., (2019), dalam pengembangan pendidikan di Provinsi NTT perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi preferensi utama, yaitu: ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai efektivitas dalam bagian proses ajar mengajar, kualitas serta kuantitas tenaga pendidik, metode dan manajemen pengajaran, peran orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam menopang pengembangan pendidikan pembelajaran yang bermutu.

Kenyataan yang ada di Provinsi NTT ini yaitu faktor demografis yang jauh dari pusat kota dengan keterbatasan infrastruktur serta konektivitas yang jauh memadai pada tahun 2017 sebesar 11% sekolah atau ruang kelas rusak serta tak layak dipakai, kemudian jatah APBN 20% untuk pendidikan yang tersebar diseluruh Indonesia namun pada tahun 2016 Kemendikbud hanya mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 1.3 triliun ke Provinsi NTT disebar untuk 22 Kabupaten dan Kota, selanjutnya gaji guru yang berstatus honorer pada tahun 2017 hanya 200 ribu hingga 300 ribu per bulannya yang sangat jauh dari upah minimum provinsi yang ditetapkan, serta banyak penduduk yang miskin membuat adanya keterbatasan dalam menempuh pendidikan (Harman, 2017).

Berlandaskan pada permasalahan yang sudah dijelaskan, maka peneliti tergiring untuk meneliti pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya pengaruh yang positif antara upah minimum dan pendidikan, sedangkan penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya (Padang & Murtala, 2019) yang menyatakan bahwasanya jumlah penduduk miskin serta tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, lalu penelitian dari (Julianto & Suparno, 2016) upah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, lantas penelitian dari (Oktavia, 2020) pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, merujuk pada penelitian (Laga & Lobwaer, 2020) mengatakan bahwasanya jumlah penduduk miskin tidak punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta penelitian yang dilaksanakan (Widayati et al., 2017) mengatakan bahwasanya tingkat pendidikan serta jumlah pengangguran tidak ada pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang dan *research gap* dari riset terdahulu, maka peneliti tergiring untuk menggarap penelitian dengan judul **“Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

I.2 Perumusan Masalah

Beralaskan pada latar belakang diatas, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur berfluktuasi di tahun 2015-2019 serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif rendah dibandingkan Provinsi Bali dan Maluku, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati antrean ke-16 terendah dari 34 Provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi dengan tingkat persentasenya rata-rata 22% yang mana kurang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini membuat penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur persentasenya masih besar bahkan melebihi persentase penduduk miskin secara nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami fluktuasi disetiap tahunnya akibat dari tenaga kerja yang tidak terserap banyak sehingga belum secara optimal dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi satu diantara provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia yang mana upah minimum ditetapkan oleh pemerintah daerah dibawah 2 juta

Pratiwi Sulistyowati, 2021

DETERMINASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

rupiah, serta pendidikan yang di representasikan melalui rata-rata lama sekolah melihat bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh masih sedikit rendah hal tersebut membuat tingkat pendidikan di Provinsi ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya dan belum mencapai wajib belajar 12 tahun sebagaimana sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sehingga penelitian ini ingin melihat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019?
- b. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019?
- c. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019?
- d. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas, maka tujuan adanya penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019.

- d. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2015-2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dinantikan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan pijakan dasar bagi pembaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai determinasi pertumbuhan ekonomi selain itu bagi peneliti bisa memakai penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Aspek Praktis

- 1) Bagi Instansi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian ini bisa dijadikan gambaran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyelesaian permasalahan penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, serta pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa menjelaskan keadaan sebenarnya dari hasil yang telah dilakukan. Serta kemampuan memantau kinerja pemerintah daerah/pusat dari segi sarana mapun prasarana.

- 3) Bagi Peneliti

Penelitian ini dinantikan bisa menambah informasi serta wawasan mengenai pertumbuhan ekonomi.